

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN MELALUI LELANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Nama Mahasiswa : Arlinawati
NIM : 5304171111
Dosen Pembimbing : Husni Mubarak, SE.I., M.A.cc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang beserta kendala-kendalanya. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Tahun 2019 barang milik daerah yang telah laku terjual melalui lelang sebanyak 12 kendaraan dinas dengan Jumlah uang jaminan 39% dari jumlah harga limit, sedangkan jumlah bea lelang 2% dari jumlah harga terjual. Tahun 2020 barang milik daerah yang telah laku terjual melalui lelang sebanyak 26 kendaraan dinas dengan jumlah uang jaminan 21% dari jumlah harga limit, sedangkan jumlah bea lelang 2% dari jumlah harga terjual. Kendala-kendala yang terjadi adalah barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada kelengkapan surat menyuratnya berupa STNK dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penghapusan barang milik daerah dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis. Solusi yang dilakukan alangkah baiknya bagi pengguna barang pada saat terjadinya kehilangan STNK, sebaiknya dilapor kepihak yang berwajib agar dapat ditindaklanjuti dengan semestinya dan alangkah baiknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan program sosialisasi kepada SKPD yang bersangkutan.

Kata Kunci: Penghapusan barang milik daerah, Lelang, BPKAD.

**PROCEDURE FOR REGIONAL PROPERTY REMOVAL WITH
FOLLOW-UP ON SALES THROUGH AUCTIONS AT THE
REGIONAL FINANCIAL AND ASSETS MANAGEMENT
AGENCY OF BENGKALIS REGENCY**

Name : Arlinawati
Nim : 5304171111
Supervisor : Husni Mubarak, SE.I., M.A.cc

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for the elimination of regional property with follow-up sales through auctions and the constraints. The type of data used in this study is qualitative data with a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the Regional Financial and Asset Management Agency of Bengkalis Regency has implemented the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning the Management of Regional Property and the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27/PMK.06/2016 concerning Instructions for Implementation of Auctions. In 2019 regional property that had been sold through auction were 12 official vehicles with a total security deposit of 39% of the total limit price, while the total auction fee was 2% of the total sold price. In 2020, regionally owned goods that have been sold through auction are 26 official vehicles with a total security deposit of 21% of the total limit price, while the amount of auction fees is 2% of the total sold price. The obstacles that occur are that the goods are registered for deletion but there is no completeness of the correspondence in the form of a Vehicle Number Certificate (VNC) and the lack of socialization regarding the importance of deleting regional property within the Bengkalis Regency local government. The solution is that it would be better for the user of the goods at the time of the loss of the VNC, it should be reported to the authorities so that it can be followed up properly and It would be better if the Bengkalis Regency Regional Financial and Asset Management Agency conducted a socialization program to the relevant regional work unit.

Keywords : *Elimination of regional property, Auction, RFAMA.*